

## ***Collaborative Governance* terhadap Posko RT Sigap sebagai Upaya Menekan Angka Covid-19**

Shinta Alfiah Nur<sup>1\*</sup>, Lulu Qurrata A'yun<sup>2</sup>, Nursaleh Hartaman<sup>3\*</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>123</sup> Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

email: shintaalfianur.ha@gmail.com<sup>1\*</sup>, luluqurrataayun02@gmail.com<sup>2</sup>, nursaleh1994@gmail.com<sup>3\*</sup>

### **Abstract**

*Collaboration between the government, private and community is urgently needed in preventing the spread of Covid-19, collaboration of the three stakeholders is included in the practice of good governance paradigm. One of the important roles in implementing good governance is the community, which has an obligation to monitor process of good governance, especially in midst Covid-19. This study aimed to determine how the government collaborates on the role of Posko RT Sigap as an effort to reduce the number of Covid-19 in Kutai Kartanegara Regency. This type of research used qualitative descriptive methods. Technique of determine informants by purposive sampling with information data in the form of interviews, observations, documentation and various literatures from books, journals, notes, words, pictures and writing at the time of research. The results showed the role of Government, private, and society in economic development the midst of Covid-19 through the Posko RT Sigap program was carried out with small steps as a form of concern for each other to sharing forms of programs provided to the community affected by Covid-19 through transparent collaboration so the objectives of the Posko RT Sigap can be realized, namely as effort to reduce Covid-19 number in Kutai Kartanegara Regency.*

**Keywords:** *Good Governance; Collaborative Governance; Posko RT Sigap; Covid-19;*

### **Abstrak**

*Kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, kolaborasi dari ketiga stakeholders tersebut termasuk kedalam praktek paradigma good governance. Salah satu peran penting di dalam penerapan good governance ialah masyarakat, yang memiliki kewajiban untuk memantau bagaimana proses good governance terutama di tengah Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kolaborasi pemerintah terhadap peran Posko RT Sigap sebagai upaya menekan angka Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik penentuan informan dengan cara purposive sampling melalui data informasi berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan berbagai literatur baik dari buku, jurnal, catatan, kata-kata, gambar maupun tulisan pada saat melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam pengembangan ekonomi di tengah masa pandemi Covid-19 melalui program Posko RT Sigap dilaksanakan dengan berbagai peran mulai dari langkah kecil sebagai wujud kepedulian antar sesama hingga berbagi bentuk program atau bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui kolaborasi yang transparan agar tujuan Posko RT Sigap dapat diwujudkan yakni sebagai upaya menekan angka Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara.*

**Keywords:** *Good Governance; Collaborative Governance; Posko RT Sigap; Covid-19;*

\*)Penulis Korespondensi

E-mail : nursaleh1994@gmail.com

## **Pembahasan**

Good governance merupakan salah satu paradigma baru dalam pelayanan publik. Paradigma good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Sejalan dengan itu, Wasistiono (2003) dikutip dari (Muis et al., 2016) mengemukakan bahwa tuntutan adanya good governance timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara dalam menciptakan sistem untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Menurut (Uar, 2016) good governance dilaksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilatar belakangi oleh salah satu faktor yang terbesar yaitu ketidakberdayaan pemerintah dalam menghadapi era globalisasi. Menurut (Nata et al., 2018) good governance adalah, penyelenggaraan pemerintahan kesinergiaan interaksi yang konstruktif (state, private sector and society). Hal ini mencerminkan bahwa tujuan di dalam penyelenggaraan suatu negara perlu dilakukan secara bersama antara ketiga stakeholders. Sesuai dengan pendapat (Hanafi & Tungadewi, 2019) yang menyatakan bahwa good governance adalah sistem yang menjalankan

kepemerintahan berdasar pada pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, peran good governance dianggap penting dalam perwujudannya yang dapat bersinergi agar kebijakan pemerintah pusat tentang pencegahan penyebaran Covid-19 dapat diimplementasikan. Dari ketiga pilar good governance saling memberi dukungan yang positif apabila dalam implementasi collaborative governance dapat dilakukan secara maksimal. Penting untuk mengetahui dinamika proses collaborative governance dalam menangani pandemi Covid-19 yang tentu saja penuh dengan tantangan dan kendala di tengah ketidakpastian yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Collaborative governance menurut (Chris Ansell & Alison Gash, 2007) adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholders non-state didalam proses pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik atau program publik. Collaborative governance dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu titik tumpu pada tahapan (Emerson et al., 2012) dan titik tumpu pada aksi kebijakan dalam mencapai tujuan bersama secara kolaboratif (Agranoff & McGuire, 2004). Melalui dua sudut pandang tersebut maka collaborative governance dapat terlihat dengan berbagai aksi kebijakan yang dilakukan oleh beberapa sektor dalam tahapan tertentu seperti dalam konteks Covid-19.

Berdasarkan laporan dari Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kutai Kartanegara menyatakan bahwa peta penyebaran Covid-19 di Kutai Kartanegara per tanggal 3 April 2021 tercatat sebanyak 11.501 kasus yang terkonfirmasi terinfeksi Covid-19, terdiri dari 11.491 kasus baru dan 10 kasus terinfeksi, dengan rincian 647 orang sedang menjalani isolasi, 10.652 orang dinyatakan telah sembuh, 202 kasus meninggal dunia dan 7 kasus probable ([gugus-tugas.kukarkab.go.id](http://gugus-tugas.kukarkab.go.id)). Dari data tersebut menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 sangat cepat, sehinggaantisipasi awal sangat dibutuhkan guna memerangi Covid-19. Oleh karena itu Bupati Kutai Kartanegara berusaha menekan angka Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya dengan menggelar operasi patuh masker dan Rapid test secara berkala. Perlu adanya alternative yang efektif agar apabila terjadi dampak yang terburuk masih ada alternative yang bisa diambil. Hal terpenting saat ini adalah membentuk program untuk menekan angka Covid-19 yang hampir setiap hari terus mengalami peningkatan kasus terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka dari itu Bupati Kutai Kartanegara melakukan kolaborasi bersama Forkopimda yakni Polres Kutai Kartanegara bersama Kodim 0906 Tenggarong dengan melibatkan anggota Balakar Panji, Linmas Panji, Babinsa Panji, Babinkamtibmas Panji, Pusban dan Warga RT telah membuat suatu program Posko RT Sigap yang pembentukannya memang diprioritaskan pada desa yang angka penyebaran covid-19 masih cukup tinggi. Kedepannya Posko RT Sigap dapat memberikan sebuah hasil yang positif sebagai bentuk dari hasil bottom up participation atau partisipasi dari bawah atau masyarakat kepada pemerintah.

Dengan melibatkan peran stakeholders tentu harus mengedepankan komitmen kolaborasi, terutama peran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menjalankan program Posko RT Sigap. Pemerintah juga harus melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 dengan begitu masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menangani pencegahan Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana Collaborative Governance Terhadap Posko RT Sigap Sebagai Upaya Menekan Angka Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah untuk menunjang ilmu pengembangan pelaksanaan pemerintahan terkait dengan prektek paradigma good governance, serta dapat mengetahui collaborative governance terhadap program pemerintah dalam menekan angka Covid-19, secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam pengambilan keputusan penerapan dan pengembangan kebijakan terkait

dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

### Metode

Jenis penelitian yaitu kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penelitian untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Setelah itu dilakukan suatu analisis atau telaah agar dapat memperoleh suatu gambaran dalam pemecahan masalah yang dihadapi (Kuswana, 2011). Lokasi penelitian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknik pengumpulan data informasi secara kualitatif yaitu dari data primer dan sekunder. Data primer dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dari berbagai literatur baik dari buku, jurnal, catatan, kata-kata, gambar maupun tulisan pada saat melakukan penelitian. Data yang sudah dikumpulkan kemudian akan di uji keabsahan melalui triangulasi sumber (Hilman, Y. A., & Setyaningsih, A. (2022).

### Hasil dan Pembahasan

#### Peran Posko RT Sigap Sebagai Upaya Menekan Angka Covid-19 di Kabuapten Kutai Kartanegara

Dalam rangka menjalani program pemerintah pusat untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 serta berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKMBM dan Surat Edaran Satgas Covid-19 Kabupaten Kutai Kartanegara P-34/DIKNES/065, 11/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa Covid-19 dengan itu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pembentukan Posko RT Sigap Penanganan Covid-19 di tingkat RT yang tersebar di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara. Posko RT Sigap mempunyai singkatan, yaitu santun, inisiatif, gesit, antisipatif dan peduli. Fungsi Posko RT Sigap adalah sebagai upaya terobosan jempit bola guna dalam rangka pemutusan mata rantai Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Konsep dari Posko RT Sigap yaitu, setiap RT yang mempunyai posko harus melakukan pendataan mengenai status kesehatan di wilayahnya, selalu mengontrol pendatang di wilayahnya dan mengontrol pendatang dari dalam maupun luar kota. Warga pendatang wajib melapor di Posko RT Sigap dan di cek kesehatannya oleh relawan dan tim medis setempat. Adapun persiapan Posko RT Sigap yaitu, menyiapkan tempat pemeriksaan lebih lanjut bagi warga pendatang maupun warga setempat yang mempunyai gejala Covid-19 dan mempersiapkan tempat karantina bagi warga yang dinyatakan positif Covid-19. Dengan adanya Posko RT Sigap diharapkan dapat tumbuh dan berkembang di masa pandemi agar masyarakat merasa terlindungi. Berikut gambar perkembangan persebaran Covid-19 selama adanya Posko RT Sigap di Kutai Kartanegara.



Gambar 1. Pemetaan Persebaran Covid-19 Bulan Februari 2021 di Kab. Kutai Kartanegara

Sumber: diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan gambar diatas, pemetaan wilayah persebaran Covid-19 pada tanggal 13 Februari 2021 menunjukkan bahwa zona hijau 125 desa/kelurahan, zona kuning 78 desa/kelurahan, zona orange 18 desa/kelurahan dan zona

merah 16 desa/kelurahan. Pada bulan Februari, program Posko RT Sigap mulai di launching kan pada desa yang terdampak Covid-19 secara signifikan.



Gambar 2. Pemetaan Persebaran Covid-19 Bulan Maret 2021 di Kab. Kutai Kartanegara  
Sumber: diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan gambar diatas, pemetaan wilayah persebaran Covid-19 pada tanggal 24 Maret 2021 menunjukkan bahwa zona hijau 158 desa/kelurahan, zona kuning 66 desa/kelurahan, zona orange 7 desa/kelurahan dan zona merah 6 desa/kelurahan. Perbandingan antara bulan Februari dan Maret menunjukkan bahwa ada perubahan jumlah zona secara signifikan.



Gambar 3. Pemetaan Persebaran Covid-19 Bulan Mei 2021 di Kab. Kutai Kartanegara  
Sumber: diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan gambar diatas, pemetaan wilayah persebaran Covid-19 pada tanggal 15 Mei 2021 menunjukkan bahwa zona hijau 174 desa/kelurahan, jumlah zona kuning 58 desa/kelurahan, zona orange 3 desa/kelurahan dan zona merah 2 desa/kelurahan. Perbandingan antara bulan Februari, Maret dan Mei menunjukkan bahwa terjadi perubahan jumlah zona secara signifikan. Dari ketiga gambar pemetaan diatas, menunjukkan bahwa peran dari program Posko RT Sigap yang bertujuan untuk menekan angka Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara menghasilkan dampak positif bagi warga setempat. Dengan berjalannya program Posko RT Sigap di Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat dijadikan suatu bentuk kerjasama, dukungan ataupun kolaborasi dengan melibatkan para stakeholders agar tatanan masyarakat di lingkungan yang terdampak Covid-19 dapat terus solid dan kuat walaupun tengah berada di masa pandemi Covid-19 ini.

### Peran Pemerintah

Bupati Kutai Kartanegara melakukan kolaborasi bersama Forkopimda yakni Polres Kutai Kartanegara bersama Kodim 0906 Tenggarong dengan melibatkan anggota Balakar Panji, Linmas Panji, Babinsa Panji, Babinkamtibmas

Panji, Pusban dan Warga RT setempat telah membuat program Posko RT Sigap di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Koordinator Satgas dan ketua RT 03 Desa Bangunrejo mengatakan bahwa Posko RT Sigap pertama kali diterapkan di RT 01, RT 02, RT 03 mulai dilaksanakan bulan Februari 2021. Alasan mengapa Posko RT Sigap harus diimplementasikan karena menurut Koordinator Satgas Desa Bangunrejo berpendapat bahwa Posko RT Sigap memberikan penguatan dan semangat untuk dilakukan secara bersama-sama. Walaupun setiap daerah memiliki perbedaan karakter wilayah, akan tetapi dengan penguatan akan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat. Sedangkan menurut ketua RT 03 berpendapat bahwa Posko RT Sigap diharapkan dapat menjadi suatu program yang peduli desa sehat termasuk menjamin seluruh warga masyarakatnya sehat. Mulai dari saling mengingatkan antar masyarakat bahkan masyarakat yang melanggar akan direspon sangat cepat sebab berkolaborasi dengan Babinsa, Linmas, dan pihak-pihak yang mendukung penertiban selama Posko RT Sigap. Dengan adanya hal tersebut maka masyarakat akan menyadari bahwa Posko RT Sigap merupakan alternative yang efektif. Sehingga kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila pemerintah bisa melaksanakan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak yang dilibatkan dalam program yang akan dilaksanakan.

### **Peran Swasta**

Peran swasta dengan adanya Posko RT Sigap sebagai upaya menekan angka Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan gerakan peduli Covid-19 dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Instansi swasta yang melakukan bantuan sosial kepada masyarakat adalah Yayasan Life After Mine yang turut aktif dalam mengatasi dampak Covid-19. Yayasan Life After Mine memberikan bantuan berupa pemberian 5-unit rumah layak huni kepada masyarakat melalui instansi pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Total nantinya akan ada 30 rumah yang didistribusikan. Tidak hanya membangun transit mess, namun Yayasan Life After Mine juga mendukung program strategis lain seperti peternakan sapi dan budidaya jagung. Selain itu, PT Multi Harapan Utama (MHU) dan MMS Grup Indonesia (MMSGI) juga memberikan bantuan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Timur, terkhususnya di Samarinda dan Kutai Kartanegara. MHU dan MMSGI Beraksi Untuk Negeri memberikan bantuan APD medis dan sembako dengan total senilai Rp5 miliar. Adapun bantuan APD medis yang diberikan PT MHU dan MMSGI antara lain 10.000 set pakaian medis, 250 kotak masker N95, 2500 kotak masker bedah, 1.000 unit kacamata medis dan 3.000 kotak sarung tangan medis. Sementara untuk sembako akan didistribusikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Terdiri dari 45 ton beras, 15.000 liter minyak goreng dan 15.000 kotak mie instan. Manfaat dari kedua lembaga swasta ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang terdampak Covid-19 terutama keluarga pasien yang positif Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Peran Masyarakat**

Menurut Samah & Aref, 2009 yang dikutip dari (Hermawan & Suryono, 2016) menyatakan partisipasi merupakan proses pembangunan sosial, dimana orang sebagai subjek dalam lingkungan mereka sendiri dan mengatasi masalah umum yang mereka hadapi. Adanya Posko RT Sigap cukup membawa dampak positif sebab program Posko RT Sigap, mereka berprinsip bahwa dalam satu lingkup lingkungan sama saja satu lingkup dengan keluarga. Peran yang dapat dilaksanakan masyarakat sebagai upaya menekan angka Covid-19 di lingkungan sekitar yaitu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, penyemprotan disinfektan dan gerakan peduli tetangga. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada keluarga masyarakat yang terdampak Covid-19. Peran para stakeholder sangat menjadi penentu awal dalam mewujudkan keadaan ekonomi

masyarakat kedepannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan sumber daya yang merupakan salah satu alternative dalam melakukan pengembangan ekonomi. Masyarakat memiliki peran utama dalam mewujudkan pengembangan ekonomi di tengah masa pandemi Covid-19. Dengan program Posko RT Sigap adalah terobosan kebijakan pemerintah dalam mengatasi keadaan ekonomi masyarakat. Sebab hal tersebut sejalan dengan pendapat Mubyarto, 2004 yang dikutip (Wardana, 2016) modal manusia (human capital) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Posko RT Sigap memberikan dampak positif kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Posko RT Sigap merupakan program Bupati Kutai Kartanegara yang bekerjasama dengan Forkopimda yakni Polres Kutai Kartanegara bersama Kodim 0906 Tenggarong dengan melibatkan anggota Balakar Panji, Linmas Panji, Babinsa Panji, Babinkamtibmas Panji, Pusban dan Warga RT. Agar Posko RT Sigap dapat dilaksanakan secara maksimal perlu adanya penerapan konsep good governance yang melibatkan kolaborasi dari ketiga pilar good governance (stakeholders) yakni Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Yang mana dari ketiga peran pilar tersebut dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan dari Posko RT Sigap sendiri dapat diwujudkan yakni sebagai upaya menekan angka Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbagai bentuk peran mulai dari pemberian bantuan, dukungan, hingga pengetahuan dapat dijadikan sebagai bentuk peduli kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

### **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemeirntahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar atas support dan dukungannya.

### **Daftar Pustaka**

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2004). Collaborative public management: New strategies for local governments. In *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. <https://doi.org/10.5860/choice.41-1215>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hanafi, Y. S., & Tunggadewi, U. T. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*.
- Hilman, Y. A., & Setyaningsih, A. (2022). The Role of The Village Administration in The Management of Tourist Village in Pacitan Regency. *MAJAPAHIT POLICY*, 2(2).
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. <https://doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8111>
- Kaltim Today. (2021). Yayasan Life After Mine Bantu Bangun Rumah Layak Huni di Desa Jembayan Kukar. <https://kaltimtoday.co/yayasan-life-after-mine-bantu-bangun-rumah-layak-huni-di-desa-jembayan-kukar/>. diakses pada 19 Mei 2021.

- Kuswana, D. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kutai Kartanegara. (2021). *Pandemi Covid-19 Kutai Kartanegara*. <http://gugus-tugas.kukarkab.go.id/>. diakses 18 Mei 2021.
- Muis, M. A. H., Saleh, H. A., & Rusli, A. M. (2016). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Nata, I., Manossoh, H., & Mawikere, L. M. (2018). Analisis Atas Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pada Dinas Perumahan Kawasanpermukiman Dan Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20049.2018>
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang good governance.
- Samarinda. (2021). PT MHU Sumbang APD & Sembako Bernilai RP5 MILIAR. <https://kaltimprov.go.id/berita/pt-mhu-sumbang-apd-dan-sembako-bernilai-rp5-miliar>. diakses pada 19 Mei 2021.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik*. Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.
- Tenggarong.Swarakaltim. (2021). Bupati Kukar Resmikan Posko RT Sigap, Bagian Ikhtiar Fisik Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19. diakses pada 19 Mei 2021.
- Uar, A. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.31>
- Wardana, D. P. (2016). Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. *INOVASI : Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*.